

Press Release

“Mewaspadaai Gejolak Pangan dan Energi 2018”

Jakarta, Kamis 25 Januari 2018

Kantor INDEF

Awal 2018 perekonomian Indonesia diwarnai dengan dinamika harga pangan dan energi yang berpotensi menjadi ‘batu sandungan’ bagi upaya akselerasi perekonomian. Dari dalam negeri, bahan pangan paling pokok di Indonesia yaitu beras mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi sehingga ‘mendesak’ Pemerintah untuk melakukan stabilisasi. Kebijakan impor beras akhirnya dieksekusi sebagai exit strategy jangka pendek mengatasi lonjakan harga yang juga belum tentu efektif. Disamping beras, polemik importasi komoditas pangan lain seperti Gula dan Garam juga mulai kembali mengemuka.

Dari luar negeri, harga minyak mentah dunia terus menunjukkan tren peningkatan sejak pertengahan tahun lalu (Juli 2017). Meskipun kenaikan harga minyak mentah dunia sangat mungkin menguntungkan bisnis minyak di sisi hulu, namun tentunya pemangku kepentingan ekonomi tidak lupa bahwa Indonesia adalah Net Importir

Bahan Bakar Minyak (BBM). Artinya menjadi sangat tidak rasional jika Menteri Keuangan hanya melihat secara parsial bahwa kenaikan harga minyak dunia justru menguntungkan APBN. Memang, beban subsidi BBM di APBN dipatok sangat minimal seiring adanya realokasi subsidi, namun beban yang harus ditanggung masyarakat belum tentu ikut minimal, karena mereka terpapar langsung atas gejolak harga minyak global yang terjadi saat ini.

INDEF sebagai lembaga riset independen menyampaikan sejumlah catatan kritis atas fenomena lonjakan sejumlah harga pangan (khususnya beras) dan minyak dunia di awal tahun ini:

1. Urgensi Rehabilitasi Perekonomian

- Pangan dan energi merupakan penentu utama stabilitas perekonomian Indonesia. Sementara pengelolaan pemenuhan dan stabilitas harga pangan dan energi masih dilakukan secara ad hoc belum menyelesaikan pokok persoalan.
- Tingkat kecanduan impor Indonesia terhadap komoditas pokok tersebut kian mengkhawatirkan, akibatnya perekonomian sangat rentan dengan dinamika perekonomian global, serta produktivitas nasional tidak pernah maksimal karena potensi ekonomi domestik tidak dikelola dengan baik.
- Pemenuhan konsumsi BBM dan pangan dari impor terus meningkat, impor beras pun dilakukan demi stabilisasi harga, padahal sebentar lagi petani panen.
- Jika harga pangan terus mengalami gejolak, maka upaya pemulihan daya beli masyarakat akan terhambat. Artinya target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen akan sulit dicapai.

2. Harga Minyak Dunia Melonjak, Untung atau Buntung?

- Interrelasi APBN dengan gejolak harga minyak dunia mungkin mulai mengecil seiring pemangkasan subsidi BBM, namun risiko ekonomi tetap akan muncul dan sifatnya langsung dihadapi oleh masyarakat.
- Ini artinya, sungguh pun APBN tidak akan “jebol” gara-gara kenaikan harga minyak dunia -bahkan berdampak positif dalam simulasi sensitivitas APBN 2018-, namun tidak ada jaminan bahwa daya beli masyarakat tidak akan turun karena gejolak harga minyak dunia apabila kenaikan harga minyak dunia sepenuhnya di teruskan ke konsumen.
- Pada lain sisi, bila sebagian atau semua selisih harga BBM ditanggung oleh Pertamina maka akan mengganggu kelancaran bisnisnya sehingga keuntungannya tentu semakin tergerus. Akibatnya kemampuan investasinya

pasti akan semakin lemah padahal kondisi saat ini membutuhkan banyak kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.

- Pemerintah perlu segera menegaskan opsi mana yang dipilih: 1) meneruskan sebagian/keseluruhan kenaikan harga minyak global ke konsumen, 2) menugaskan Pertamina menanggung sebagian/keseluruhan selisih harga dengan konsekuensi menurunnya keuntungan dan setoran deviden atau 3) menambah Penanaman Modal Negara sebagai konsekuensi penugasan tersebut. Dapat juga diambil kombinasi antara ketiga opsi di atas, yang penting jelas sehingga masyarakat, dunia usaha dan Pertamina bisa membuat perencanaan di tahun 2018.

3. Stabilitas Rupiah Jangan Lengah

- Kenaikan harga minyak ditengah ketergantungan impor minyak yang besar, berkonsekuensi pada permintaan dollar yang meningkat. Sementara kemampuan peningkatan ekspor masih sangat terbatas, sehingga berpotensi menekan keseimbangan pasar valas yang berisiko mengganggu stabilitas serta nilai rupiah.
- Kenaikan harga minyak tentu akan berdampak langsung peningkatan nilai impor BBM, tentu ini juga akan mengganggu neraca perdagangan.
- Karenanya diperlukan langkah-langkah antisipatif dari kebijakan moneter yang prudent. Termasuk koordinasi yang sinergis antara BI dan Pertamina saat akan melakukan impor minyak.

4. Ancaman Inflasi dan Menekan Daya Beli

- Kenaikan harga minyak berpotensi mendorong inflasi dan menekan daya beli masyarakat.
- Sejarah menunjukkan bahwa kenaikan Premium sebesar 23,5 persen dan Solar sebesar 36,4 persen di November 2014 diikuti oleh inflasi sebesar 3,96 persen

di bulan November-Desember 2014 yang lebih besar dari total inflasi 2017 sebesar 3,61 persen.

- Penurunan daya beli akan berpengaruh sumber utama pertumbuhan ekonomi, terutama konsumsi rumah tangga dan Investasi. Saat daya beli menurun maka rumah tangga akan menahan konsumsi saat ini, sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan ke depan.
- Penurunan daya beli juga berpengaruh terhadap aktivitas dunia usaha, tidak hanya yang berbasis konsumen (ritel) tapi juga akan berimbas ke sektor produksi (investasi).

5. Kenaikan harga minyak mengganggu sektor pembiayaan

- Saat inflasi naik, maka akan diikuti dengan kenaikan suku bunga simpanan (cost of fund) dan suku bunga pinjaman. Hal tersebut akan menyebabkan pertumbuhan kredit melambat, investasi turun, dan menekan pertumbuhan ekonomi.

6. Rekomendasi, langkah yang perlu diambil pemerintah:

- Tidak lagi mengklaim surplus beras sebelum melakukan pendataan produksi beras secara faktual dan sistematis.
- Menggelontorkan beras secara bertahap dengan tujuan stabilkan harga, lalu dihentikan ketika masa panen tiba sehingga tidak kurangi pendapatan petani Indonesia.
- Pemerintah harus segera melakukan simulasi dampak dan mengumumkan langkah mitigasi kenaikan minyak, agar memberikan kepastian terhadap dunia usaha.

- Mengambil langkah-langkah kongkrit untuk mengefisienkan pengelolaan BBM, baik di sisi hulu maupun hilir. Serta mengurangi proporsi energi fosil (PLTD) sebagai sumber pembangkit tenaga listrik.
- Menjamin ketersediaan dan stabilitas harga pangan pokok (beras) serta respon cepat pada daerah yang kekurangan. Termasuk kembali melakukan kampanye dan langkah sistematis diversifikasi pangan non-beras dengan mengutamakan makanan pokok yang diproduksi di daerah tersebut sehingga mengurangi permintaan beras jangka panjang.

Sarwo Edhie (+62813 8047 7878)